

## Pemodelan Proses Bisnis dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasangkayu

*Hanny Simanjorang<sup>1</sup>, Yuyun Tri Wiranti<sup>2\*</sup>, Lovinta Happy A.<sup>3</sup>*

<sup>1</sup> Institut Teknologi Kalimantan, Balikpapan. Email: [10161039@student.itk.ac.id](mailto:10161039@student.itk.ac.id)

<sup>2</sup> Institut Teknologi Kalimantan, Balikpapan. Email: [yuyun@lecturer.itk.ac.id](mailto:yuyun@lecturer.itk.ac.id)

<sup>3</sup> Institut Teknologi Kalimantan, Balikpapan. Email: [lovinta@lecturer.itk.ac.id](mailto:lovinta@lecturer.itk.ac.id)

### Abstract

*Department of Plantation and Animal Husbandry (Disbunak) of Pasangkayu Regency was an instrument to achieve infrastructure improvement of plantation and animal husbandry. Disbunak of Pasangkayu Regency does not have any Business Process and Standard Operational Procedure (SOP) to used as a reference in implemented activities. Based on interview with actor at Disbunak, several problems were found in the implemented activities were often a repetition of processes and processes that were missed. Therefore, Business Process Modeling and Development of Standard Operational Procedure (SOP) at the Disbunak was needed. The reference of Business Process Modeling was Regulation of the Minister for Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform No. 30 of 2018 (Permenpan RB No.30 of 2018). First stage of Business Process Modeling to conduct a vision, mission, and strategical plan. Therefore, 28 activities were made then being mapped based on its level. The level starts from Business Process Mapping level 0, level 1, to level-2 Then, Business Process modeled using Business Process Modeling and Notation (BPMN) software, called Bizagi Modeller. After being mapped, Business Process are verified by each process owner. At the stage of preparing the SOP using a reference of Regulation of the Minister for Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform No.19 of 2012 (Permenpan RB RI No. 19 of 2012), started to conduct a SOP assessment based on 28 business processes that have been modelled. After SOP assessment was fulfilled, SOP arranged using flowchart. SOP then verified by each of process owner. From the result of this study, 28 Business Processes were modeled, and 28 SOP were developed at the Disbunak of Pasangkayu Regency. Then being used as guidelines and standards in the implementation of activities at the Disbunak of Pasangkayu Regency.*

*Keywords: Dinas Perkebunan and Peternakan of Pasangkayu Regency, Bussines Process, SOP*

### Abstrak

Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Kabupaten Pasangkayu merupakan perangkat daerah yang bertugas mewujudkan peningkatan infrastruktur perkebunan dan peternakan. Disbunak Kabupaten Pasangkayu belum memiliki proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Sehingga berdasarkan hasil wawancara ditemukan beberapa permasalahan yaitu dalam pelaksanaan kegiatan sering terjadi pengulangan proses dan adanya proses yang terlewatkan. Oleh karena itu, dibutuhkan pemodelan proses bisnis dan penyusunan SOP pada Disbunak Kabupaten Pasangkayu. Pada tahap pemodelan proses bisnis menggunakan acuan Permenpan RB No 30 Tahun 2018. Tahap awal pemodelan proses bisnis yaitu melakukan inventarisasi visi, misi, dan rencana strategis. Sehingga dihasilkan 28 kegiatan yang selanjutnya dipetakan menjadi peta proses bisnis level 0, level 1, sampai level 2. Kemudian proses bisnis dimodelkan menggunakan *Business Process Modeling and Notation* (BPMN) dengan bantuan *software Bizagi Modeller*. Proses bisnis selanjutnya diverifikasi oleh masing-masing *process owner*. Pada tahap penyusunan SOP menggunakan acuan Permenpan RB RI Nomor 19 Tahun 2012. Tahap awal penyusunan SOP yaitu melakukan penilaian kebutuhan SOP berdasarkan 28 proses bisnis yang telah dimodelkan. Setelah melakukan penilaian kebutuhan SOP, kemudian SOP disusun menggunakan *flowchart*. SOP selanjutnya diverifikasi oleh masing-masing *process owner*. Dari hasil penelitian ini diperoleh 28 proses bisnis dan 28 SOP pada Disbunak Kabupaten Pasangkayu. Proses Bisnis dan SOP yang telah dibuat kemudian digunakan sebagai pedoman dan standar dalam pelaksanaan kegiatan di Disbunak Kabupaten Pasangkayu.

**Kata Kunci:** Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasangkayu, Proses Bisnis, SOP.

## 1. Pendahuluan

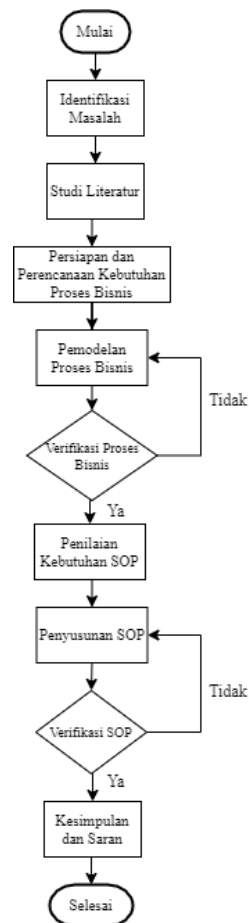
Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah memiliki peran penting yaitu menjadi salah satu pelaku strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berperan dalam menjalankan fungsi pelayanan, distribusi, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat. Fungsi pemerintah dikatakan optimal apabila tercapainya suatu keadilan dan pemerataan di dalam masyarakat. Namun, pada kenyataannya untuk menjalankan urusan pemerintahan sehari-hari, sistem birokrasi masih menyebabkan jalannya pemerintahan dan layanan publik tidak efektif dan efisien (Zumrotul, 2014). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi birokrasi, salah satunya adalah penyiapan pelaksanaan proses bisnis di instansi pemerintah. Proses bisnis merupakan rangkaian kegiatan yang saling terhubung dan dijalankan pada setiap unit organisasi (Setiawati, 2015). Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan RB RI) No. 19 tahun 2018, ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjadi referensi bagi institusi pemerintah dalam menyusun proses bisnis sektor pemerintahan guna mewujudkan tujuan, visi, misi dan strategi organisasi (Permenpan RB RI, 2018). Selain peta proses bisnis, Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP-AP) juga harus dirumuskan di setiap kegiatan tata kelola instansi pemerintah sebagai standarisasi cara perangkat menyelesaikan pekerjaannya. Sesuai kebijakan yang berlaku pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB RI) No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Standar Prosedur Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan, SOP-AP merupakan prosedur operasi standar untuk pengelolaan administrasi pemerintahan yang bertujuan untuk memberikan identifikasi, pengembangan, pencatatan, persiapan dan memantau serta menilai SOP-AP sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat pemerintah kepada semua instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah (KEMENPANRB RI, 2012).

Disbunak Kabupaten Pasangkayu merupakan perangkat daerah yang bertugas mewujudkan peningkatan infrastruktur perkebunan dan peternakan (Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasangkayu, 2016). Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan di Disbunak Kabupaten Pasangkayu terdapat program-program dan sasaran kegiatan Spada rencana kerja dan rencana strategis yang digunakan untuk mendorong perkembangan perkebunan dan peternakan di Kabupaten Pasangkayu. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Disbunak Kabupaten Pasangkayu merupakan instansi yang berdiri sejak tahun 2018 dan sebelumnya bergabung dengan Dinas Pertanian. Oleh karena itu Disbunak Kabupaten Pasangkayu merupakan dinas yang masih baru dan hal tersebut menyebabkan Disbunak Kabupaten Pasangkayu belum memiliki pemodelan proses bisnis dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi acuan dan standar pelaksanaan kegiatan. Selain hal tersebut, pada Disbunak Kabupaten Pasangkayu masih kekurangan SDM untuk melakukan penyusunan proses bisnis dan SOP. Karena tidak adanya pemodelan proses bisnis dan penyusunan SOP sehingga ditemukan beberapa permasalahan pada pelaksanaan kegiatan di Disbunak Kabupaten Pasangkayu, salah satunya adalah kegiatan pengajuan bantuan bibit tanaman dan hewan. Berdasarkan hasil wawancara, proses pengajuan bantuan memerlukan waktu yang cukup lama dalam penyelesaiannya dikarenakan adanya pengulangan proses kegiatan dan adanya proses yang terlewatkan pada saat pelaksanaannya. Hal ini disebabkan karena tidak adanya representasi model proses yang digunakan sebagai acuan dan standar dalam melaksanakan kegiatan. Permasalahan ini mengakibatkan banyaknya program dan kegiatan yang sulit terlaksanakan dan terselesaikan dengan baik (Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasangkayu, 2016).

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dibutuhkan pemodelan proses bisnis dan penyusunan SOP yang mengacu pada rencana kerja dan rencana strategis pada Disbunak Kabupaten Pasangkayu untuk dapat mendeskripsikan dan membantu pencapaian visi, misi, serta tujuan organisasi dengan menggunakan Permenpan RB RI Nomor 19 Tahun 2018 sebagai pedoman pemodelan proses bisnis serta Permenpan RB RI Nomor 35 Tahun 2012 sebagai pedoman penyusunan SOP-AP.

## 2. Metode

Adapun metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1:



**Gambar 1:** Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, tahap awal yang dilakukan adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah dilakukan dengan mewawancarai pelaksana proses bisnis mengenai proses dan kegiatan yang sedang berjalan pada Disbunak Kabupaten Pasangkayu. Dari tahap ini diperoleh permasalahan yaitu pada Disbunak Kabupaten Pasangkayu membutuhkan pemetaan proses bisnis dan penyusunan SOP. Tahap selanjutnya merupakan tahap studi literatur yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan materi sebagai referensi atau acuan berupa *paper* dan yang berkaitan dengan penelitian seperti BPM, SOP dan Permenpan RB. Selanjutnya, merupakan tahap persiapan dan perencanaan kebutuhan proses bisnis. Tahap ini dilakukan untuk memperoleh data dari wawancara terhadap pelaksana proses bisnis dan telaah rencana strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran instansi pemerintah sehingga dapat diketahui kegiatan apa saja yang terdapat pada Disbunak Kabupaten Pasangkayu. Hasil dari wawancara dan telaah rencana strategis diperlukan untuk membantu dalam melakukan tahap pemetaan proses bisnis. Luaran dari proses ini adalah diperolehnya daftar kegiatan yang akan dimodelkan yang kemudian dipetakan menjadi proses bisnis level 0, level 1, hingga level 2. Setelah dilakukan pemetaan proses bisnis, maka diperoleh daftar proses bisnis pada masing-masing bidang di Disbunak Kabupaten. Daftar proses bisnis yang diperoleh kemudian dimodelkan menggunakan BPMN dengan bantuan *software Bizagi Modeller* sesuai ketentuan yang telah dicantumkan pada pedoman pemodelan proses bisnis (Permenpan RB Nomor 19 Tahun 2018). Luaran dari proses ini adalah proses bisnis yang nantinya akan digunakan pada Disbunak Kab. Pasangkayu dan menjadi acuan dalam penyusunan SOP. Setelah dilakukan pemodelan proses bisnis, selanjutnya dilakukan verifikasi proses bisnis kepada *process owner* di masing-masing bidang pada Disbunak Kabupaten Pasangkayu. Setelah proses bisnis diverifikasi maka tahap selanjutnya merupakan tahap penilaian kebutuhan SOP. SOP yang akan dinilai mengacu terhadap proses bisnis yang

telah dibuat pada tahap sebelumnya. Untuk melakukan tahap penilaian kebutuhan SOP digunakan kriteria penilaian SOP dengan acuan Permenpan RB RI No. 35 Tahun 2012. Luaran dari proses ini adalah diperoleh daftar SOP yang akan disusun pada Disbunak Kabupaten Pasangkayu. Setelah dilakukan penilaian SOP, selanjutnya dilakukan tahap penyusunan SOP dengan menggunakan *flowcharts* dan ketentuan yang telah dicantumkan pada pedoman penyusunan SOP-AP (Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2012). *Output* dari tahap ini adalah dokumen SOP. SOP yang telah disusun kemudian diverifikasi oleh *process owner* di masing-masing bidang pada Disbunak Kabupaten Pasangkayu. Setelah pemodelan proses bisnis dan penyusunan SOP selesai dilakukan, selanjutnya melakukan penarikan kesimpulan yang berisi jawaban dari rumusan masalah yang ditetapkan di awal dan saran yang berupa masukan, baik untuk penulis maupun objek penelitian terkait perbaikan di masa mendatang.

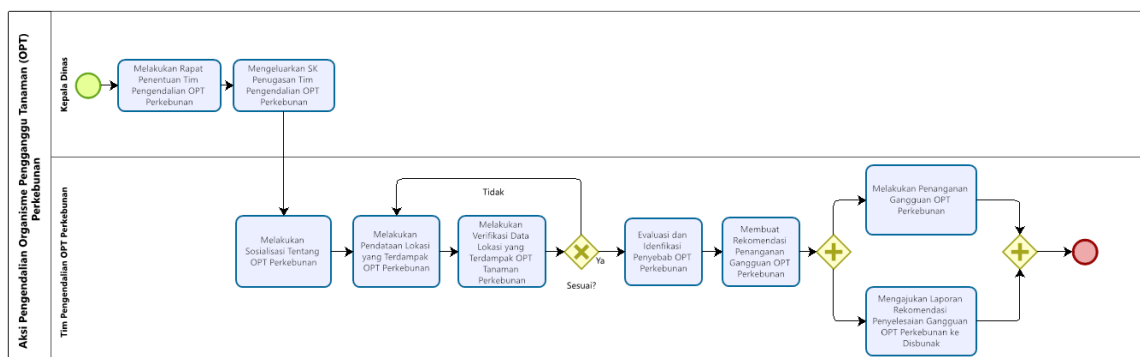
### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Persiapan dan Perencanaan Kebutuhan Proses Bisnis

Pada tahap awal penyusunan proses bisnis dilakukan persiapan dan perencanaan kebutuhan proses bisnis dengan melakukan inventarisasi rencana strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran sehingga dapat diketahui kegiatan (proses kerja) pada Disbunak Kabupaten Pasangkayu. Untuk memperoleh daftar proses yang akan digunakan dalam pemetaan proses bisnis maka dilakukan telaah rencana strategis dan wawancara kepada masing-masing bidang pada Disbunak Kabupaten Pasangkayu. Dari hasil telaah dokumen rencana strategis dan wawancara diperoleh 28 daftar proses yang diturunkan dari 17 butir program yang dilakukan oleh Disbunak, 17 butir program ini diturunkan dari 5 sasaran strategis yang mengacu pada sebuah tujuan dari Disbunak Kabupaten Pasangkayu. Hasil telaah rencana strategis kemudian digunakan untuk memudahkan penggambaran peta proses bisnis yang dibedakan menjadi beberapa level atau tingkatan yaitu level 0, level 1, hingga level 2. Peta proses bisnis level 0 diperoleh dari sasaran strategis pada rencana kerja Disbunak Kabupaten Pasangkayu, peta proses bisnis level 1 diperoleh dari program kerja yang terdapat pada rencana kerja Disbunak Kabupaten Pasangkayu, dan peta proses bisnis level 2 diperoleh dari kegiatan yang terdapat pada rencana kerja Disbunak Kabupaten Pasangkayu.

#### 3.2. Pemodelan Proses Bisnis

Setelah dilakukan pemetaan proses bisnis, selanjutnya dilakukan pemodelan proses bisnis sesuai dengan jumlah proses yang telah dipetakan. Daftar proses yang diperoleh kemudian dikelompokkan berdasarkan kegiatan yang dilakukan masing-masing bidang. Pada Gambar 2 merupakan salah satu proses bisnis yang dimodelkan pada Disbunak Kabupaten Pasangkayu yaitu proses bisnis Aksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan. Pihak yang terkait dengan proses bisnis ini adalah Kepala Dinas dan Tim Pengendalian OPT Perkebunan. Proses bisnis ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi terkait penanganan gangguan OPT perkebunan dan dihasilkannya laporan rekomendasi penyelesaian gangguan OPT perkebunan.



Gambar 2: Pemodelan Proses Bisnis

### 3.3. Verifikasi Proses Bisnis

Setelah dilakukan pemetaan proses bisnis, selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap proses bisnis yang telah dimodelkan. Verifikasi proses bisnis dilakukan oleh masing-masing *process owner* yaitu Kepala Bidang pada Disbunak Kabupaten Pasangkayu. Dari hasil pemetaan proses bisnis diperoleh 28 proses bisnis yang dimodelkan. Pada Tabel 1 merupakan proses bisnis pada Bidang Perkebunan yang diverifikasi oleh Kepala Bidang Perkebunan. Terdapat 6 proses bisnis pada bagian perkebunan yaitu Pengawasan Mutu Benih/Bibit Perkebunan, Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian, Aksi Pengendalian Tanaman Perkebunan, Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penerapan Izin Usaha Perkebunan, Penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) bagi Pekebun Sawit Rakyat, dan Pelatihan Teknis bagi Petugas Perkebunan.

**Tabel 1** : Verifikasi Proses Bisnis

No	Nama Proses Bisnis	Process Owner
1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Perkebunan	Seksi Perbenihan dan Perlindungan
2	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Seksi Penyuluhan
3	Aksi Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan	Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin
4	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penerapan Izin Usaha Perkebunan	Seksi Penyuluhan
5	Penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) bagi Pekebun Sawit Rakyat	Seksi Penyuluhan
6	Pelatihan Teknis bagi Petugas Perkebunan	Seksi Penyuluhan

### 3.4. Penilaian Kebutuhan SOP

Setelah dilakukan pemodelan proses bisnis, selanjutnya dilakukan tahap penilaian kebutuhan SOP pada Disbunak Kabupaten Pasangkayu. Penilaian kebutuhan SOP berdasarkan 28 proses bisnis yang telah dibuat. Untuk melakukan penilaian kebutuhan SOP digunakan Tabel 2 sebagai tabel penilaian yang sesuai dengan Permenpan RB RI No. 35 Tahun 2012 (Pedoman Penetapan Standar Prosedur Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan). Dari hasil penilaian kebutuhan SOP diperoleh daftar kebutuhan SOP yang akan disusun pada Disbunak Kabupaten Pasangkayu.

**Tabel 2** : Penilaian Kebutuhan SOP

Satuan Kerja	Bidang	Prosedur	Penilaian Keterkaitan Dengan:				Prioritas:
			Tupoksi	Peraturan Perundang-undangan	Stakeholders (Masyarakat)	Prosedur Lainnya	

Sumber : Permenpan RB RI No. 35 Tahun 2012

### 3.5. Penyusunan SOP

Setelah dilakukan penilaian kebutuhan SOP, selanjutnya dilakukan penyusunan SOP. Penyusunan SOP menggunakan panduan dari Permenpan RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah. Dalam penyusunan SOP terdapat dua unsur utama yaitu unsur dokumentasi (aksesoris) dan unsur prosedur. Pada unsur dokumentasi terdapat halaman judul (*cover*) yang berisi judul SOP, instansi/satuan kerja, tahun pembuatan, dan informasi lain yang diperlukan. Unsur prosedur terdiri dari 2 bagian, yakni bagian identitas dan bagian flowchart. Bagian identitas dalam SOP berisi Logo dan Nama Instansi/Unit, Nomor SOP AP, Tanggal Pembuatan, Tanggal Revisi, Tanggal Efektif, Pengesahan oleh Pejabat, Judul SOP AP, Dasar Hukum, Keterkaitan, Peringatan, Kualifikasi Pelaksana, Peralatan dan Perlengkapan, serta Pencatatan dan Pendataan. Gambar 3 merupakan contoh bagian *flowchart* SOP pada Disbunak Kabupaten Pasangkayu.

No	Uraian	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kadis	Kepala Seksi Kesehatan Hewan	Tim Pemeriksa	Pengecer Obat Hewan	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengeharkan Surat Tugas Pengawasan Peredaran Obat Hewan					Surat Keputusan/Surat Tugas	1 Hari	Surat Keputusan/Surat Tugas	
2	Menerima Surat Tugas Pengawasan Peredaran Obat Hewan					Surat Keputusan/Surat Tugas	10 Menit	Surat Keputusan/Surat Tugas	
3	Mendatangi Pengecer Obat Hewan					Surat Keputusan/Surat Tugas	1 Hari	Pemeriksaan Terhadap Pengecer Obat Hewan	
4	Melakukan Pemeriksaan Terhadap Obat Hewan yang Dicecer					Surat Keputusan/Surat Tugas	2 Jam	Mengetahui Jenis Obat, Mutu, dan Kandungan Obat	Mengikuti Syarat EPOM Tentang Pengedaran Obat Hewan
5	Membuat Laporan Daftar Obat yang Tidak Layak Diedarkan					Jenis Obat, Mutu, dan Kandungan Obat	1 Hari	Surat Pemberitahuan Jenis Obat yang Boleh dan Tidak Boleh	
6	Menyetujui Laporan Daftar Obat yang Tidak Layak Diedarkan					Jenis Obat, Mutu, dan Kandungan Obat	10 Menit	Surat Persetujuan Pengecer Obat	
7	Mengajukan Surat Hasil Pemeriksaan Kelayakan Obat kepada Pengecer Obat					Surat Persetujuan Pengecer Obat	1 Jam	Surat Persetujuan Pengecer Obat	
8	Menerima Surat Hasil Pemeriksaan Kelayakan Obat					Surat Persetujuan Pengecer Obat	10 Menit	Surat Persetujuan Pengecer Obat	

Gambar 3: Penyusunan SOP

### 3.6. Verifikasi SOP

Setelah dilakukan penyusunan SOP, kemudian tahap selanjutnya dilakukan verifikasi SOP kepada masing-masing *process owner*. Terdapat 28 SOP yang diverifikasi pada Disbunak Kabupaten Pasangkayu. Pada Tabel 3 merupakan SOP pada Bidang Perkebunan. Terdapat 6 SOP pada Bidang Perkebunan yaitu SOP Pengawasan Mutu Benih/Bibit Perkebunan, SOP Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian, SOP Aksi Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan, SOP Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penerapan Izin Usaha Perkebunan, SOP Penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) bagi Pekebun Sawit Rakyat, dan SOP Pelatihan Teknis bagi Petugas Perkebunan.

Tabel 3: SOP Bidang Perkebunan

No	Nama SOP	Process Owner
1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Perkebunan	Seksi Perbenihan dan Perlindungan
2	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Seksi Penyuluhan
3	Aksi Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan	Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin
4	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penerapan Izin Usaha Perkebunan	Seksi Penyuluhan
5	Penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) bagi Pekebun Sawit Rakyat	Seksi Penyuluhan
6	Pelatihan Teknis bagi Petugas Perkebunan	Seksi Penyuluhan

## 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan akhir dalam penelitian ini yaitu telah dilakukan pemodelan 28 proses bisnis berdasarkan rencana strategis pada Disbunak Kabupaten Pasangkayu menggunakan acuan Permenpan RB RI Nomor 19 Tahun 2018. Untuk melakukan pemodelan proses bisnis, langkah awal penyusunan proses bisnis yaitu dengan melakukan inventarisasi terhadap visi, misi, dan rencana strategis, sehingga dapat dilakukan pemetaan proses utama dan proses pendukung pada Disbunak Kabupaten Pasangkayu. Pada proses utama terbagi menjadi 3

(tiga) proses yaitu Peningkatan Kualitas Perkebunan, Peningkatan Kualitas Peternakan, dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan/Peternakan. Sedangkan, pada proses pendukung terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja, dan Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor dan Pengelolaan Administrasi. Dari 28 proses bisnis yang telah dimodelkan kemudian dilakukan penyusunan SOP sebanyak 28 SOP pada Disbunak Kabupaten Pasangkayu menggunakan acuan Permenpan RB RI No 35 Tahun 2012. Proses bisnis dan SOP yang telah dibuat, digunakan sebagai standar pelaksanaan kegiatan pada Disbunak Kabupaten Pasangkayu.

## 5. Saran

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pada Disbunak Kabupaten Pasangkayu dapat melaksanakan tahap implementasi dari proses bisnis dan SOP yang telah dibuat sesuai dengan Permenpan RB RI No. 19 Tahun 2018 tentang penyusunan proses bisnis dan Permenpan RB RI No. 35 Tahun 2012 tentang penyusunan SOP. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan tahap akhir dalam penyusunan proses bisnis dan penyusunan SOP yaitu tahap monitoring dan evaluasi. Pada tahap monitoring dan evaluasi diharapkan dapat memastikan kinerja pelaksana sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam SOP. Monitoring sebaiknya dilaksanakan secara reguler setiap 6 (enam) bulan sekali dan evaluasi sebaiknya dilakukan secara reguler dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sekali. Tahapan dalam melakukan monitoring dan evaluasi dapat menyesuaikan pada pedoman Permenpan RB RI No. 19 Tahun 2018 (Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah) dan sesuai Permenpan RB RI No. 35 Tahun 2012 (Pedoman Penyusunan SOP-AP).

### 1. Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan anugerah-Nya dapat menyelesaikan penelitian ini. Ucapan terimakasih disampaikan kepada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasangkayu (Disbunak Kabupaten Pasangkayu) dan semua pihak yang terlibat dalam kelancaran pengerjaan penelitian ini.

### 2. Referensi

- Brocke, J. V., & Rosemann, M. (2010). *Handbook on Business Process Management 1*. New York: Springer.
- Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasangkayu. (2016). *Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasangkayu*. Kabupaten Pasangkayu.
- Ismanto. (2020). *Pemodelan Proses Bisnis Menggunakan Business Process Business Process Modelling Notation (BPMN)*. Blitar.
- OMG. (2011). *Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0*. Object Management Group.
- Perdanakusuma, A. R. (2020). *Pemodelan Proses Bisnis Pelayanan Aduan Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto dengan Menggunakan Business Process Model Notation (BPMN)*. Malang.
- Permenpan RB RI. (2012). *Penyusunan Standar Operasional Prosedur Instansi Pemerintah*. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
- Permenpan RB RI. (2018). *Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah*. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
- Rachmadi, A. (2020). *Penyusunan Model Proses Pelayanan Publik pada Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau ( Studi Kasus Layanan Perizinan )*. Malang.
- Rahmawati, D. (2017). *Analisis dan Pemodelan Proses Bisnis Bidang Pelayanan Perizinan Menggunakan Business Process Model and Notation (BPMN) (Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Malang)*. Malang.
- Ridlo, I. A. (2017). *Panduan Pembuatan Flowchart*. Surabaya.
- Tathagati. (2014). *Step by step membuat SOP*. Jakarta: Efata Publishing.
- Widayanto. (2017). *Analisis Proses Bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Konveksi Ryan Collection di Kabupaten Kudus*. *Jurnal Administrasi Bisnis*
- Zumrotul. (2014). *Standar Operasional Prosedur Administrasi*. Surabaya.